

## FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA (DPRP) TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI PAPUA

**Abstrak :** Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua telah dilaksanakan oleh DPRP melalui kegiatan penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

**Kata kunci :** Fungsi Pengawasan, DPRP, PAD

### PENDAHULUAN

Hakikat dari pengawasan mengandung arti yaitu suatu proses menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya sesuai dengan rencana semula (Manullang dalam Situmorang dkk, 1994 : 20). Pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kesalahan-kesalahan dan kelemahan-kelemahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah terulangnya kembali (Henry Fayol dalam Situmorang dkk, 1994 : 21). Sujanto (1996 : 53) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan mempunyai dua arti yaitu pengawasan dan pengendalian.

Memasuki era penyelenggaraan Otonomi Daerah dimana menjadi reposisi, restrukturisasi dan reformasi dalam struktur kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah, tuntutan masyarakat akan penegakan supremasi hukum semakin gencar. Hal ini telah menuntut optimalisasi kinerja sejumlah lembaga pengawasan internal pemerintah maupun lembaga independen serta mendorong tumbuhnya semangat *social control* dari masyarakat terutama dari kalangan pers dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya untuk melakukan pemantauan atau monitoring

baik langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh aspek-aspek pengelolaan keuangan negara dan daerah termasuk pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, masalah pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 ayat 10 No. 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memuat asas desentralisasi dan dekonsetrasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) mengatur bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kekuasaan Republik Indonesia, dan Pasal 1 ayat (8) menetapkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan / atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Ini berarti bahwa Pemerintah Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap seluruh proses dan kegiatan pengelolaan sumber penerimaan dan pengelolaan keuangan daerah khususnya PAD. Dalam era desentralisasi dan dekonsentrasi saat ini, eksistensi dan peranana hukum menjadi sangat vital dan urgen dalam mengatasi sejuta polemik dan permasalahan yang melanda negeri ini. sejumlah permasalahan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, yang mana terus bermunculan kepermukaan dan nmembutuhkan solusi atau penneylesaian secara hukum dengan segera.

Pengelolaan keuangan daerah khususnya sumber pendapatan daerah atau disebut PAD telah diatur dalam pasal 157 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas ayat (1) : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dana lain-laian PAD yang sah; ayat (2) : dana perimbangan, dan ayat (3) : lain-lain pendapatan daerah yangt sah. Pasal 159 menetapkan bahwa dana perimbangan terdiri atas : dana bagi hasil, DAU dan DAK. Pengelolaan

keuangan daerah yang bersumber dari berbagai sektor penerimaan PAD baik pajak, retribusi maupun sumber penerimaan lainnya tidak jarang menimbulkan berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran karena dikelola secara tidak transparan dan akuntabel. Maraknya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi akibat perilaku korupsi sejumlah pejabat pengelola keuangan dan komponen birokrasi mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga didalam upaya mengefektifkan fungsi pengawasan terhadap pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam pengelolaan Pendapatan Daerah, tentunya tidak dapat dilepaskan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diprogramkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam pengelolaan ini Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mempunyai peran melakukan pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan khususnya terhadap sirkulasi pendapatan asli daerah sehingga fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut maka pertanyaan yang akan dikaji adalah Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **Pengertian pengawasan**

Menurut Siagian (1990:19) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi pemerintah daerah untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Menurut Manullang (dalam Situmorang dkk, 1999:20) bahwa pengawasan adalah

suatu proses menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan Henry Fayol (dalam Situmorang dkk, 1994:21) bahwa pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan.

Sujamto (1996:53) bahwa fungsi pengawasan mempunyai dua arti yaitu Pengawasan dan pengendalian. Menurutnya pengawasan adalah pengawasan dalam arti yang sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Adapun pengendalian adalah segala kegiatan atau usaha untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.

Situmorang dkk (1994:21) menjelaskan bahwa pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dari pengertian tersebut di atas, juga terdiri atas dua, yaitu pertama adalah menggambarkan wujud dari kegiatan pengawasan. Kedua adalah menggambarkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh pengawasan tersebut.

Leonard D. White (dalam Sujamto, 1987:23) mengemukakan maksud pengawasan adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijaksanaan yang diperbuat, apakah sesuai atau tidak.
- b. Untuk menjamin bahwa kekuasaan digunakan untuk tujuan yang baik dan mendapat dukungan serta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai wakil rakyat.
- c. Untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dijamin oleh Undang-Undang dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan pengusaha.

### **Aspek Hukum Pengelolaan Data PAD (Pendapatan Asli Daerah)**

Pengelolaan penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada dasarnya telah ditetapkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun landasan hukum pungutan pajak secara konstitusional diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Dalam penjelasan ini pasal 23 dinyatakan bahwa betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana diperolehnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat sendiri dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Perkembangannya, meskipun telah diundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang juga mengatur mengenai pemungutan pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan bahwa :

- a. Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah.
- b. Dengan peraturan daerah ditetapkan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- c. Peraturan daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku pengesahan pejabat yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak boleh berlaku surut.
- d. Pengembalian atau pembebasan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak boleh berlaku surut.
- e. Pengembalian atau pembebasan pajak daerah dan retribusi daerah hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Pasal 21 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak, yaitu (d)mengelola kekayaan daerah, (e) memungut pajak daerah dan

retribusi daerah, (f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Pasal 22 huruf j bahwa daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya produktif di daerah.

Dikatakan Abdurrachman (1987:155) bahwa inti dari segala persoalan mengenai kemampuan otonomi adalah faktor keuangan, dimana keuangan daerah sangat menentukan efektif pelaksanaan pemerintah daerah, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun pelaksanaan pembangunan di daerah". Sumber pendapatan daerah sebagaimana. Diatur dalam pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun sebagai berikut:

Sumber pendapan daerah sebagai berikut:

- a. Pendapatan asli daerah, yaitu:
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil perusahaan milik Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang pisahkan, dan
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain penerimaan yang sah

Selanjutnya mengenai dana perimbangan yang di maksudkan pada pasal 157 huruf b di atas juga telah diatur dan ditetapkan dalam pasal Undang-Undng No. 32 Tahun 2004, meliputi :

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)
- c. Dana Alokasi khusus (DAK)

Pasal 160 Undng-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan:

- (1) Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam
- (2) Dana bagi hasil bersumber dari pajak terdiri dari:
  - a. Pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor pedesaan, pertambangan serta kehutanan.

- b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
- c. Pajak Penghasilan.

(3) Dana Bagi Hasil bersumber dari sumber daya alam terdiri dari:

- a. Penerimaan kehutanan dari iuran hak pengusaha hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dan reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- b. Penerimaan pertambangan Umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari dari penerimaan pungutan pengusaha perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
- d. Penerimaan dan pertambangan minyak yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan.
- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan.
- f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari daerah bersangkutan.

Pasal 161 Undang-undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan:

- (1) DAU dialokasikan berdasarkan persentase dari pendapatan dalm negeri netto yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU –nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Pasal 162 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menjelaskan :

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan dari APBD kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk :

- a. Mendanai kegiatan khusus yang di tetapkan Pemerintah atas dasar prioritas nasional.
  - b. Menandai kegiatan khusus yang diusulkan oleh daerah tertentu.
- (2) Penyusunan kegiatan yang ditentukan oleh Pemerinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Penyusunan kegiatan khusus yang di tetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
- (4) Kegitan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam upaya untuk menggali sumber-sumber keuangan daera sendiri, tentu dibutuhkan kewenangan dan kemampuan dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, bahwa :

- 1. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam Sistem Pemerintahan Daerah.
- 2. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan Pemerintahan menjadi kewenangan daerah.

#### **4.3. Pengawasan Eksternal terhadap Penerimaan Pendapatan Asil Daerah (PAD)**

Pengawasan eksternal melibatkan orang ataupun lembaga atau badan di luar organisasi Pemerintahan terutama DPRD. Lembaga legislatif ini mempunyai tugas dan fungsi utama yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembangunan dan pelayanan



masyarakat, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan Penerimaan Pendapatan Asil Daerah (PAD). DPRP memiliki hak wewenang untuk meminta pertanggung jawaban eksekutif sehubungan dengan hal tersebut diatas.

Bagaimana aktivitas DPRP melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Penerimaan Pendapatan Asil Daerah (PAD) Dispenda Provinsi Papua, terungkap dari hasil kuesioner terhadap 50 responden sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 11 :**

**Pendapat responden tentang keaktifan DPRP melakukan pengawasan dalam optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asil Daerah (PAD)**

Kategori pendapat responden	Frekuensi (F)	Presentase (%)
Aktif	13	26,0
Kurang aktif	27	54,0
Tidak aktif	15	20,0
Jumlah	55	100,0

*Sumber : Hasil olahan data primer, 2010*

Secara keseluruhan data pada tabel 11 di atas menunjukkan bahwa pencapaian aktivitas DPRP melakukan pengawasan Penerimaan Pendapatan Asil Daerah (PAD) pada Dispenda Provinsi Papua adalah sebesar 26,0 % dan dapat dikategorikan kurang optimal. Hal semacam ini terungkap dari hasil penulis dengan responden bahwa mereka tidak pernah terlibat dan jarang melihat anggota DPRP berkunjung ke Dispenda

melakukan pengawasan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dispenda sehingga kurang aktif.

Hasil wawancara langsung penulis dengan Kepala Dispenda mengungkapkan bahwa instansi yang dipimpinnya terkadang mendapat kunjungan ataupun panggilan dari anggota DPRP sehubungan dengan tugas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diembangnya, namun semua itu dapat diatasi dengan baik.

Hasil wawancara langsung penulis dengan sejumlah narasumber dan informan mengungkapkan bahwa seharusnya DPRP sebagai lembaga kontrol eksekutif lebih proaktif dan rutin melakukan monitoring langsung maupun tidak langsung dalam rangka fungsi pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan ataupun manipulasi data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari berbagai sumber Penerimaan, namun kenyataannya jarang terlihat anggota DPRD bersangkutan melakukan monitoring langsung terhadap Dispenda selaku Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **4.4. Pengawasan DPRP terhadap Penerimaan PAD**

Objek pengawasan lembaga legislatif (DPRP) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dapat di implementasikan melalui penggunaan hak-hak DPRP sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.

Fungsi pengawasan DPRP terhadap pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di implementasikan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRP. Adapun hak-hak yang dimiliki oleh DPRP tersebut adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

##### **1. Pengawasan melalui penggunaan hak DPRP meminta keterangan**

Penggunaan hak meminta keterangan ini oleh DPRP kepada pihak eksekutif merupakan pelaksanaan daripada hak interpelasi DPRP. Dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang susunan dan kedudukan MPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat Kabupaten kota, pejabat pemerintah Kabupaten Kota, Badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.

Penggunaan hak meminta keterangan kepada pemerintah daerah oleh DPRD dilakukan dengan mengajukan usul oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada daerah baik secara tertulis maupun secara lisan mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Apabila dalam rapat Paripurna menyetujui usul permintaan keterangan pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan atau tertulis terhadap pemerintah keterangan anggota DPRD. Untuk mengetahui penilaian responden mengenai penggunaan hak DPRD dalam meminta keterangan kepada Kepala Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 12 : Tanggapan responden mengenai efektivitas pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggunaan hak meminta keterangan kepada Gubernur

Kategori Jawaban	F	Presentase
Sangat efektif	20	28,12
Cukup efektif	25	37,50
Kurang efektif	15	21,88
Sangat tidak efektif	5	12,50
Jumlah	55	100

Sumber : Data Primer yang diolah 2010

Penggunaan hak DPRP untuk meminta keterangan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah atau pejabat Pemda terkait dilakukan jika ditengarai terjadi penyimpanan suatu kebijakan yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan penggunaan hak ini dalam pengawasan pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) biasanya dilakukan jika pihak DPRP menerima laporan dari masyarakat, atau temuan langsung anggota Dewan terhadap penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Data dalam tabel 12 diatas memperlihatkan penilaian responden mengenai efektivitas pengawasan pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui hak meminta keterangan DPRP kepada Pemerintah Daerah terlihat penilaian responden mencapai 28,12 % yang berarti pelaksanaan fungsi ini sudah terlaksana cukup baik.

Sekalipun demikian jika dicermati frekuensi penilaian responden dalam tabel 12 tersebut masih dijumpai beberapa responden yang menilai bahwa pelaksanaan pengawasan ini kurang efektif seperti dikemukakan oleh sekitar 21,88 % dari keseluruhan responden yang ada. Namun secara keseluruhan presentase penilaia responden sudah cukup baik.

Alasan sebagian rersponden yang mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan melalui permintaan keterangan oleh DPRP tidak efektif karena pada umumnya yang dipanggil hanya pejabat Pemda yang menjadi pelaksana teknis suatu kegiatan. Pada umumnya penyimpangan dan penyelewengan yang dijadikan sebagai alasan meminta keterangan oleh DPRP ini berkisar pada pelaksanaan kegiatan secara teknis, bukan pada sasaran dan kebijakan yang telah ditentukan.

Padahal seperti fungsi pengawasan DPRP terhadap pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bukan

dari aspek teknisnya tetapi mengawal kebijakan yang ada yakni untuk menjamin apakah pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat atau dengan kata lain tepat sasaran misalnya hasil kegiatan dimanfaatkan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan DPRP melalui permintaan keterangan dari Pemerintah Daerah, berikut dapat dilihat frekuensi kegiatan meminta keterangan yang dilakukan oleh DPRP.

**Tabel 13 :**

**Tanggapan responden mengenai frekuensi kegiatan DPRP Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah**

Kategori Jawaban	f	Presentase
Selalu (5 kali <)	20	18,75
Kadang-kadang (3-4 kali)		
Jarang (1-2 kali)	25	53,13
Tidak pernah	10	28,13
	5	0,0
Jumlah	55	100

*Sumber : Data Primer yang diolah 2010*

Penilaian responden dalam tabel 13 diatas memperlihatkan frekuensi kegiatan DPRP meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelaksanaan atau penggunaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua, tampak penilaian responden mencapai 18,75 % hal ini berarti frekuensi kegiatan meminta keterangan berada pada kategori baik.

Jika diperhatikan penilaian keterangan diatas ternyata frekuensi kegiatan meminta keterangan yang dianggap selalu adalah lebih dari lima kali dalam satu Tahun anggaran, sedangkan yang dinilai kadang-kadang dilakukan sekitar tiga sampai empat kali, sementara yang dinilai kurang apabila kegiatan ini hanya dilaksanakan antara satu sampai dua kali dalam setiap Tahun anggaran.

Sebenarnya kegiatan meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ini bukan hanya dilihat pada seringnya kegiatan itu dilaksanakan namun apabila terjadi suatu kasus atau ada hal-hal lain berupa kebijakan yang dianggap penting, apakah itu dilakukan karena memang dijumpai penyimpangan atau karena ada laporan dari masyarakat terhadap penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyimpang dari peruntukannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dari hasil pengamatan yang dilakukan pada Sekretariat DPRP Provinsi Papua di jumpai hasil catatan rapat yang menunjukkan terdapat beberapa orang anggota Dewan yang mengajukan hak interpelasi tetapi pada umumnya kandas atau tidak disetujui pada tingkat rapat Paripurna.

Efektifnya pelaksanaan hak meminta keterangan DPRP kepada Kepada Daerah/Gubernur atau pejabat Pemda yang ditunjuk apabila ada respon dari Pemerintah Daerah. Berikut dapat dilihat tabel berikut :

**Tabel 14 : Tanggapan responden mengenai respon pejabat Pemda dalam Memberikan keterangan dihadapan DPRP**

Kategori Jawaban	F	Presentase
Sangat baik	20	34,38
Cukup baik	25	53,13
Kurang baik	10	12,49
Sangat tidak baik	5	0,0
Jumlah	55	100

*Sumber : Data Primer yang diolah 2010*

Penilaian responden mengenai respon pejabat Pemerintah Daerah dalam memberikan keterangan dihadapan DPRP jika diundang oleh Dewan sebagaimana terlihat dalam tabel diatas memperlihatkan pencapaian adalah 34,38 % yang berarti respon pejabat daerah cukup baik, hal ini berarti pejabat daerah cukup kooperatif dalam mematuhi panggilan DPRP untuk memberikan keterangan.

Berasarkan persentase penilaian responden diatas sebagaimana terlihat masih ada sekitar 12,49 % responden nilai bahwa respon pejabat daerah kurang baik dalam memenuhi panggilan DPRP untuk memberikan keterangan. Penilaian tersebut dari keterangan yang diperoleh dari seorang informan dikatakan bahwa hal itu hasilnya berkaitan dengan masalah ketepatan waktu saja. Kadangkala pada saat pemenaggilan untuk memberikan keterangan tidak dapat dihadiri karena ada kegiatan lain, sehingga hal ini menyebabkan adanya penundaan waktu.

Pendapat dari responden lainnya mengenai ketidakpuasan terhadap respon pejabat Pemerintah Daerah yang diundang oleh DPRP untuk diminta keterangannya mengenai pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) apada instansi teknis yang dipimpinnya adalah kadangkala pemimpin istansi yang

diundang, biasanya terjadi mereka mengutus ke kantor DPRD adalah pejabat yang mewakili. Kepala

## 2. Penggunaan hak DPRD mengadakan penyelidikan

Pelaksanaan hak melakukan penyelidikan oleh DPRP berbeda dengan hak penyelidikan dalam rangka penengak hukum. Hak penyelidikan DPRP berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan yang ditunjuk untuk menyelidiki keadaan pemerintahan baik dalam rangka mengetahui pelaksanaan pemerintahan maupun untuk mencari bahan-bahan dalam rangka merumuskan kebijakan. Namu penyelidikan dapat juga dilakukan oleh DPRP karena dugaan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau penyimpangan yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu temuan hasil penyelidikan DPRP bukan dalam rangka melakukan tindakan hukum sebagai proses *pro-justicia*, melainkan untuk melakukan tindakan pemerintahan terhadap Kepala Daerah, misalnya meminta pertanggungjawaban.

Temuan-temuan DPRP secara hukum tidak dapat dijadikan bukti telah terjadi suatu tindak pidana, walaupun secara materil mungkin mengandung kebenaran. Namun demikian, temuan-temuan DPRP tetap penting sebagai bahan untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan secara hukum. Karena DPRP dapat saja meminta aparat hukum untuk melakukan penyidikan terhadap suatu penyimpangan kebijakan.

Mengadakan penyelidikan merupakan salah satu hak DPRP, dalam pelaksanaannya dapat melibatkan seluruh unsur-unsur dalam pemerintahan daerah yang bersangkutan maupun diluarnya termasuk masyarakat umum.

**Tabel 15 : Tanggapan responden mengenai efektivitas  
Pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**



**(PAD) Melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan**

Kategori Jawaban	F	Presentase
Sangat efektif	20	34,38
Cukup efektif	25	53,13
Kurang efektif	10	12,49
Sangat tidak efektif	5	00,00
Jumlah	55	100

*Sumber : Data Primer yang diolah 2010*

Penilaian responden mengenai efektivitas pengawasan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggunaan hak mengadakan penyelidikan sebagaimana terlihat dalam tabel 15 yang dicapai dari rata-rata penilaian responden mencapai 34,38 % yang berarti pengawasan dapat berjalan sangat baik jika hak mengadakan penyelidikan ini digunakan oleh DPRP terhadap setiap kasus penyimpangan atau dugaan penyimpangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari data tersebut persentase penilaian responden yang cukup tinggi berada pada kategori cukup efektif 53,13%. Sementara yang menilai kurang efektif hanya 12,50 % dari seluruh responden yang ada.

Melihat kecenderungan penilaian responden di atas tampak bahwa hak mengadakan penyelidikan ini dipandang efektif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRP terutama terhadap penggunaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hanya saja hak ini jarang digunakan. Hal ini disebabkan karena peraturan teknis yang mengatur tata cara melakukan penyelidikan belum ada.

Pada kenyataan banyak pejabat instansi Pemerintah Daerah yang dimintai keterangan oleh DPRP berkaitan dengan adanya

laporan dari masyarakat, hanya saja pihak DPRP menerima penjelasan dari pihak Pemerintah Daerah tanpa melakukan kunjungan ke lokasi kegiatan, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman para anggota Dewan terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Papua telah dilaksanakan oleh DPRP melalui kegiatan penggunaan hak meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah, penggunaan hak meminta keterangan sudah terlaksana, meskipun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari frekuensi kegiatan DPRP meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah hanya kadang-kadang dilaksanakan, sedangkan respon Pemerintah Daerah dalam memberikan keterangan dihadapan DPRP cukup baik.

### **Saran**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hendaknya anggota DPRP mengikuti / menyelenggarakan berbagai pelatihan pendidikan khusus yang dapat menunjang peningkatan kualitas anggotanya dan sedapat mungkin memanfaatkan berbagai peluang, fasilitas serta anggaran yang tersedia secara optimal dan seefisien mungkin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 1987. *Berapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, PT. Media Sarana Pers, Jakarta.

- Agus Sambada, 1999. **Kewajiban Perpajakan bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi (Tinjauan dari Sisi Wajib Pajak)**, BPFE, Yogyakarta.
- Alfian, 1990. **Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR Yang Diinginkan Oleh UUD 1945**, Dalam Jurnal Ilmu Politik, Nomor 7, AIPI, LIPI dan PT. Gramedia Jakarta.
- Azhary, 1995. **Benarkah DPR Mandul, Pemilu, Partai dan DPR Masa Orde Baru**, Gigaft Publishing, Yogyakarta.
- Bayu Suryanigrat, 1981. **Desentralisasi Dan Dekonsentrasi Pemerintah di Indonesia Suatu Analisis**, Jilid I, Dewaruci Press, Jakarta.
- B.N Marbun, 1983. **DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan**, GHALIA Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Thaib, **DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**, Liberty, Yogyakarta.
- Mahir Raksaka, 2002. **Kebijaksanaan Bantuan Pusat ke Daerah**, UI. Jakarta.
- Manullang, 1989. **Beberapa Aspek Pemerintah Daerah**, PT. Pembangunan, Jakarta.
- Maskun, 1995. **Pembangunan dan Pelaksanaan Otonomi Daerah yang Luas**, BPFE, Jakarta.
- Memet. R.S, 1993. **Prospek Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah**, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Mirian Budiyo dan Ibrahim Ambong, 1993. **Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pilipus M. Hajon, 2002. **Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, Kariktorasi, Volume I Nomor 1 Halaman 20.
- Rochmat Soemitro, 2000. **Pajak dan Pembangunan**, Eresco, Bandung.
- Sujanto, 1993. **Perspektif Otonomi Daerah**, Bineka Cipta, Jakarta.
- Suprianto, 1993. **Administrasi Pembangunan Daerah**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya A.W., 2002. ***Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000.
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan.
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang No. 17 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah